

AKADEMISI DALAM JERAT KEKUASAAN; PARTISIPAN POLITIK ATAU BUDAK PENGUASA?

Oleh: Paul Ama Tukan
(Mahasiswa Semester IV STFK Ledalero)

Abstrak

Relasi kekuasaan (elite politik) dan kaum intelektual (akademisi) acap kali menimbulkan dilema serius; kekuasaan (politik) harus terpisah secara tegas defenitif dengan otonomi ilmu pengetahuan (kerja akademik) di satu sisi dan keterlibatan akademisi dalam agenda politik sebagai varian partisipasi politik. Asumsi yang kerap timbul ialah basis kerja pengetahuan harus terbebas dari belenggu kekuasaan agar penalaran ilmiah dan pencarian saintifik tidak terjerebab dalam kubangan kepentingan kuasa dan kalkulasi ekonomi politik. Tulisan ini berisi kajian hubungan antara akademisi dan kekuasaan di tengah gejala cengkeraman kekuasaan politik. Berangkat dari sejumlah pelanggaran akademik yang melilit kampus, penulis akan menguraikan posisi akademisi sebagai partisipan politik sambil mempertimbangkan peran strategis lain keberadaan akademisi dalam panggung publik. Sebagai akhir, penulis menyodorkan beberapa upaya mengembalikan peran akademisi terutama dalam konteks normalitas baru akibat krisis pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Kekuasaan, Akademisi dalam Jerat Kekuasaan.

Pendahuluan

Krisis akibat pandemi Covid-19 yang menggedor sejumlah keamanan sistem kehidupan tidak saja menelanjangi kerentanan kita tetapi juga membuka peluang intimitas relasional antara kekuasaan dan akademisi dalam upaya “merancang” validitas ilmu pengetahuan untuk melayani kepentingan parsial. Majalah *Tempo* edisi 1-7 Februari 2021 memuat sebuah laporan menarik tentang pelanggaran dalam dunia riset dan publikasi kampus beserta dugaan keterlibatan sejumlah petinggi kampus dengan kekuasaan (birokrasi pemerintah). *Tempo* menginvestigasi petinggi kampus yang diduga terlibat dalam praktek plagiarisme maupun swaplajarisme/*self-plagiarism*. Plagiarisme berarti penjiplakkan karya publikasi atau riset dari penulis/peneliti lain tanpa mencantumkan sumber secara memadai dan lengkap. Sedangkan swaplajarisme/*self-plagiarism* adalah penjiplakkan terhadap karya sendiri seperti menerbitkan/mengirim satu karya yang sama ke beberapa media publikasi/jurnal.¹

“Wajah Kusam Kampus”, demikian tema besar yang ditulis *Tempo* dengan sejumlah investigasi mendalam. Sejumlah kampus dan rektor, sebut saja Muryanto Amin, rektor Universitas Sumatera Utara (USU) diduga melakukan swaplajarisme atas riset dan publikasinya. Dalam catatan *Tempo*, Pelanggaran akademik ini diduga melibatkan lingkaran istana karena aspek kedekatan Muryanto dan sejumlah pejabat tinggi. Tidak hanya itu, ditemukan juga sejumlah media publikasi berupa jurnal-jurnal ilmiah yang tidak kredibel dan diduga ditunggangi sejumlah kepentingan (kekuasaan) untuk menopang pengangkatan jabatan pengajar. *Tempo* bahkan menyebut sejumlah nama rektor maupun staf pengajar kampus beserta perguruan tinggi ternama di Indonesia yang telah melakukan praktek yang melawan etika akademik ini seperti Anggito Abimayu (dari Universitas Gadjadara), Anak Agung Banyu Perwira (Universitas Katolik Prahyanan Bandung), Grace Kandou (Universitas Sam Ratulangi Manado) dan beberapa kampus lainnya.

Fakta yang disebutkan di atas tentu menggelisahkan karena kualitas publikasi dan riset di kampus semakin menurun. Alih-alih mengawal kekuasaan sebagai partisipan politik, para intelektual justru terjerembab dalam lingkaran kekuasaan untuk meraup jatah jabatan ilmiah. Kampus terjebak dalam nafsu untuk meraih prestasi dan lupa akan kerja ilmiah terutama tuntutan kebajikan intelektual yang mesti diemban. Pertanyaan paling mendasar ialah mengapa praktek tidak terpuji ini terjadi di sejumlah lingkungan akademis kampus? Apakah akademisi kita hari-hari ini tercebur dalam lingkaran pragmatisme naif yang menghamba pada kepentingan politis oportunistik dan alpa mensuplai bobot akademis kebijakan publik?

Kaum Intelektual dan Partisipasi Politik

I. Partisipasi Politik Tidak sebatas Partisipasi dalam Penyelenggaraan Demokrasi Formal

Defenisi Partisipasi Politik tidak terbatas pada keterlibatan memberikan hak suara dalam penyelenggaraan demokrasi formal seperti Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Defenisi yang terbatas ini hampir pasti 'terkonsep' dalam pikiran banyak orang mengingat hangatnya suhu politik pada saat Pemilu dan Pilkada serta antusiasme partisipatif warga yang cukup dinamis ketika perhelatan demokrasi ini dijalankan. Pemilu maupun Pilkada menstimulasi orang untuk menentukan keberpihakannya, terlibat dalam diskusi yang alot terkait figur calon pemimpin. Ada tendensi bahwa partisipasi politik dimanifestasikan secara terbatas hanya dalam urusan memberikan hak suara atau mendukung salah satu kandidat pemimpin politik. Di sinilah konsep partisipasi politik perlu dijernihkan.

Dalam defenisi yang lebih kompleks, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan/*lobbyng* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen atau bergabung dalam suatu gerakan sosial dengan prinsip-prinsip dan

orientasi yang bisa dipertanggungjawabkan.¹ Partisipasi politik dengan demikian tidak hanya suatu kepatuhan menjalankan perhelatan demokrasi formal melainkan juga suatu gerakan yang melibatkan *direct action* yang nyata.

Herbert McClosky, seorang tokoh masalah partisipasi politik lebih tegas berpendapat bahwa partisipasi politik harus berorientasi pada upaya pembentukan kebijakan umum (*public policy*).² Berpartisipasi dalam politik berarti terlibat secara aktif untuk mempengaruhi dan membentuk kebijakan umum, suatu gerakan untuk terlibat dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, jelas bahwa partisipasi politik tidak hanya sebatas memberi hak suara dalam Pemilu atau Pilkada.

Partisipasi politik juga suatu keterlibatan berwatak komunal; berpikir dan bertindak dalam upaya mengadabkan dan mengonstruksi kebijakan publik yang berpihak pada rakyat dan kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini selalu berkaitan dengan kebijakan pemerintah sebagai pengatur kehidupan berbangsa. Konsep ini secara tegas diafirmasi oleh Samuel P. Huntington dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing* sebagaimana dikutip Budiardjo, “*by political participation we mean activity designed to influenced governments decision making*”, yang kita maksud dengan partisipasi politik adalah aktivitas yang dirancang untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.³

Konsep partisipasi politik di atas hemat penulis menampilkan dua format; simpati tematis untuk mengucapkan pikiran dan akses teknis agar pikiran itu bisa mempengaruhi kebijakan publik. Simpati tematis berarti suatu konsistensi untuk mengajukan konsep dan mengucapkan dalil secara tepat dan radikal. Di sini, partisipasi politik bersentuhan dengan kualitas akademis suatu argumentasi. Andaikata seorang individu atau kelompok ingin mengkritisi kebijakan politik tertentu maka dalil yang diucapkan harus sungguh-sungguh memadai secara rasional, juga didasarkan pada data-data empiris yang bisa merepresentasikan suatu kebenaran faktual. Upaya ini bertentangan dengan fenomena yang disebut ‘pemenggalan ruang

publik oleh sentimentalitas dan intimidasi irasional'. Mengucapkan dalil dalam ruang publik berarti membiarkan dialektika rasional tercipta. Partisipasi politik dengan demikian harus terhindar dari sentimentalitas kelompok parsial dan motivasi mengobjektivasi yang lain serta tendensi mengklaim kebenaran tunggal. Orang harus sungguh-sungguh terbebas dari belenggu sentimentalitas dan semampu mungkin mengedepankan pikiran yang dinamis-rasional dan fakta-fakta yang valid.

Lebih lanjut, akses teknis pikiran berarti suatu medium dalam partisipasi politik. Partisipasi politik harus disalurkan lewat media yang tepat dan dengan cara yang demokratis. Di sini, partisipasi politik harus dilihat secara kontekstual di mana media-media telah mengalami pergeseran secara substansial termasuk orientasi dan *platform*. Peranan media digital dewasa ini tak dapat disangkal memiliki fungsi penting dalam hal menyalurkan aspirasi politik. Persis, di sinilah akses teknis bisa dipikirkan secara baik agar bisa menjawab pelbagai usaha partisipasi politik yang lebih tepat sasaran.

Posisi kaum akedemisi sebagai bentuk partisipasi politik justru dipertegas dalam usaha ilmiah untuk membuktikan suatu hipotesis dalam rangka mensuplai suatu kebijakan. Posisi akademisi di sini bukan suatu posisi kuasa struktural politis melainkan suatu komitmen intelektual untuk mengabdikan pada kebenaran objektif. Maka, partisipasi politik akademisi harus sungguh-sungguh terbebas dari kontaminasi intensi politis demi kejernihan cita-cita intelektual. Akademisi bisa menjadi seorang partisipan politik melalui profesionalitas dan kerja akademik yang ketat dan jujur demi mengawal kekuasaan.

II. Akademisi; Partisipan Politik?

Legitimasi pengetahuan dan kekuasaan politis tampaknya berada dalam dua wilayah yang sungguh-sungguh terpisah. Namun, legitimasi pengetahuan dan politik selalu berada dalam manuver yang kira-kira tidak jauh berbeda. Pengetahuan bergerak dalam pencarian empiris untuk melegitimasi suatu kebenaran objektif berdasarkan tuntutan faktual sedangkan kekuasaan politik selalu berada dalam suatu

gerak “mencari” tatanan politis yang sesuai untuk menciptakan suatu harmoni sosial politis, lebih kurang dalam *frame* menciptakan kemapanan kolektif. Kedua wilayah ini tidak sungguh-sungguh bertemu dalam satu gelanggang tetapi tetap memiliki hubungan dekat; bergerak dari sesuatu yang faktual dalam kehidupan dan selalu berdampak kolektif-universal.

Dalam menjawab pertanyaan apakah akademisi masuk sebagai partisipan politik, kita tentu harus berpijak pada tanggung jawab etis-moral penelaan ilmiah dalam kehidupan konkret. Akademisi tidak bisa lepas dari pengabdian komunal hidup bermasyarakat. Kewajiban sosial-politis selalu melekat dalam diri akademisi. Karena itu, semua penelaan ilmiah dimulai dengan menentukan masalah dan bersentuhan dengan proses pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat.⁴ Dengan demikian, politik sebagai suatu *actus* mengatur tatanan hidup bersama tidak bisa lepas secara tegas dengan komitmen ilmiah akademisi. Referensi politis selalu berangkat dari produk kerja akademisi yang cakap mengolah ilmu dan mengelaborasinya dengan realitas hidup.

Akademisi sebagai partisipan politik tidak dibaca dalam konteks kiprah kekuasaan elektoral yang lebih berwatak imperialistis. Partisipasi Politik yang dimaksud dalam hubungan dengan akademisi ialah suatu gerakan yang konsisten merefleksikan struktur dan kelembagaan secara kritis. Karena itu partisipasi dimaksud ialah suatu “gerakan kritis” yang mengintervensi kebijakan, struktur dan ideologi politik secara terbuka. Sebagai partisipan politik, akademisi mengawal dan menjembatani pihak yang mengatur dan diatur.

Akademisi dalam Jerat Kekuasaan

Pemikir politik klasik, Edmund Burke (1730-1797) yang menulis *Reflections on the Revolution in France* sebagaimana dikutip Sudiardja menyatakan bahwa sudah menjadi sifat manusia untuk selalu ingin mengambil bagian dalam kekuasaan tetapi

tidak ingin mengambil bagian dalam tanggung jawab kekuasaan.⁵ Akademisi kerap masuk dalam lingkaran kekuasaan untuk mengejar jatah jabatan ilmiah dan memuluskan agenda politik parsial. Ada tendensi untuk mengintervensi kekuasaan tetapi tidak dengan cara mempertahankan kualifikasi akademik-ilmiah yang bergerak untuk mengeritik dan mengevaluasi. Tanggung jawab ilmiah runtuh di hadapan strategi politis para pemegang jabatan.

Relasi kuasa dan ilmu pengetahuan menjadi tema yang secara spesifik dikonstruksi oleh Michel Foucault (1926-1984). Menurutnya, ilmu pengetahuan menyediakan kuasa. Secara lebih tegas, tidak ada pengetahuan tanpa kuasa. Di sini terdapat korelasi yakni pengetahuan mengandung kuasa dan kuasa mengandung pengetahuan. Mengikuti K. Bertens sebagaimana ditulis Foucault:

“Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Pengetahuan selalu bersifat politis, tetapi bukan karena mempunyai konsekuensi-konsekuensi politis atau dapat digunakan dalam perancangan politik, tetapi karena pengetahuan dimungkinkan oleh relasi-relasi kuasa. Tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat menciptakan dasar kemungkinannya sendiri; suatu ilmu dimungkinkan oleh transformasi-transformasi di antara relasi-relasi kuasa”.⁶

Yang perlu dicatat ialah gagasan Foucault di atas sama sekali tidak ditempatkan dalam suatu konteks politis, dalam arti kekuasaan imperatif-suatu jabatan struktural yang saling mensubordinasi. Foucault melihat relasi kuasa dan pengetahuan lebih kepada suatu strategi yang tidak dikaitkan dengan lembaga tertentu, khususnya aparat negara. Oleh karena itu, kekuasaan dan pengetahuan lebih dilihat dalam pengertian suatu dunia yang *in se* menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan-hubungan dari dalam.⁷ Pengetahuan pada prinsipnya tidak mencerminkan atau memanifestasikan kekuasaan tetapi ia berada di dalam relasi-

relasi kuasa. Jika politik dalam arti sesungguhnya sebagai arena teatrikal permainan kuasa, maka pengetahuan ada di dalamnya dengan otonomi kuasanya sendiri. Pengetahuan karena itu, memiliki otoritas yang mesti “mengambil jarak” dalam hal etos kerja dan idealisme karya, demi misalnya mengawal kekuasaan politis untuk menciptakan harmoni sosial-kolektif. Dengan lebih tegas, “kuasa tidak dilihat sebagai suatu proses dialektis di mana si A menguasai si B dan (setelah beberapa syarat terpenuhi) si B menguasai si A. Kuasa tidak bekerja dengan cara represif dan negatif tetapi positif dan produktif”.⁸

Hemat penulis, dalam terang pemikiran Foucault, seorang akademisi bisa masuk dalam suatu relasi kuasa karena ia dibentuk oleh jaringan wacana intersubjektif (masa lampau) yang saling bertemu tetapi ia juga berada dan selalu mempertahankan ‘kekuasaannya’ secara eksistensial sebagai seorang akademisi.⁹ Dalam kehidupan politik, akademisi tidak benar-benar ‘terlepas’ dari sengkaret politik, yang katakanlah menjadi ‘kegelisahan’ bersama dalam ruang publik. Ia tidak seperti dokter yang berdiri di luar untuk melihat pasien dan mengobatinya (melihat pasien sebagai objek) tetapi juga tidak mengambil posisi sebagai pasien yang turut tenggelam dalam kerapuhannya.¹⁰

Gencarnya keterlibatan akademisi sebagai “investor pengetahuan” dalam kekuasaan politis justru melekat secara mutualistik tanpa pemisahan yang tegas. Secara spesifik, akademisi dalam jerat kekuasaan ditampilkan dalam agenda penanganan pandemi Covid-19. Dalam ruang pelayanan medis, para akademisi di bidang kesehatan dan laboratorium gencar mengupayakan pelemahan virus melalui studi-studi serius dan investigatif. Seluruh sarana teknis diupayakan. Namun seluruh agenda akademik itu berada di tangan kekuasaan. Agenda akademik terkonversi menjadi momentum politik.¹¹ Persis, akademisi dalam jerat kekuasaan politis justru ditampilkan dengan benderang. Intimnya relasi ini tak dapat dilihat secara nyata

karena elite politik merancang narasi simbolik dengan sedikit sentuhan populis. Kerentanan ini bisa saja dilacak jika gerakan akademisi cukup berani mengambil posisi secara tegas dalam upaya melawan pembusukan politik dengan intrik kebijakan yang terlihat ramah terhadap rakyat.

Mengembalikan Peran Politik Akademisi di Tengah Normalitas Baru

Kita telah memasuki normalitas baru dengan menerima yang abnormal akibat pandemi sebagai kebiasaan. Para akademisi sains telah menjadi episentrum untuk mengukur sebaran dan efek virus mematikan ini. Normalitas yang kita jumpai ialah bahwa otoritas saintifik dan para *stakeholder* wilayah politik selalu saling merangkul dalam menentukan dinamika kehidupan publik. Kita tentu menwaspadai agar relasi otoritas akademis tidak serta merta digusur oleh syahwat politik. Normalitas baru pasca pandemi selalu bergerak paradoks; menuntut kekuatan otonomi posisi masing-masing kuasa serentak mengupayakan terciptanya resiprokalitas/ketersalingan. Peran politik akademisi tentu harus profesional sambil mempertahankan kredibilitas kerjanya di hadapan nafsu elite politik. Peran politik akademisi dapat diupayakan sebagai berikut.

Pertama, membongkar kooptasi kekuasaan tunggal.¹² Akademisi menjalankan fungsinya sebagai gerakan kritis untuk membongkar narai-narasi tunggal penguasa yang dibalut dalam bahasa simbolik dan terkesan populis. Bahasa simbolik perlu dievaluasi secara kritis agar pendasaran empiris-saintifik dapat dikedepankan. Ambil contoh, narasi yang dibangun oleh Trump, mantan presiden Amerika Serikat yang terkesan populis dalam penanganan pandemi tetapi tidak pernah memakai masker.¹³ Jadi, sistem kebijakan harus lebih percaya kepada narasi saintifik ketimbang narasi tunggal penguasa. Peran politik akademisi ialah keberanian membeberkan bukti-bukti empiris yang memadai dan bahkan lewat penemuan-penemuan itu, ia berhak untuk mengeritik penguasa yang *indifferent*. Peran besar ini memang perlu keberanian kolektif sekaligus independensi dalam upaya perwujudannya.

Kedua, keutamaan sebagai *subaltern intellectuals* atau lapisan kritis dari masyarakat. Kaum intelektual menerima pendidikan tinggi dan dari pengetahuannya mereka bisa memiliki kapital budaya yang dengannya bisa dikonversi ke dalam kapital uang dan politik.¹⁴ Akademisi masuk dalam kelompok *the new class* karena otoritasnya yang strategis. Karena itu, peran akademisi paling penting untuk mengendalikan pembentukan peradaban. Dalam arti ini, *subaltern intellectuals* ialah artikulator masyarakat yang peka berbicara dan menulis tentang ketidakadilan, mengutarakan ketertindasan dan dosa-dosa sosial dengan episteme intelektual.¹⁵ Lapisan masyarakat kritis tidak dilihat dalam kerangka gerakan anarkis tetapi lebih kepada menjalankan *critical-oppositional intellectual*¹⁶ yang bewatak *aktivism* untuk mendobrak sistem yang tidak berpihak pada lapisan masyarakat bawah. Kealpaan peran ini akan mengakibatkan “redupnya” suara eksistensial rakyat dan memproduksi intelektual retorik.

Ketiga, kebebasan sebagai intelektual. Akademisi perlu mengoperasikan agenda akademik tanpa campur tangan kekuasaan, terbebas dari intervensi politik praktis yang intensional. Jika dua pokok di atas berada dalam cakupan akademisi secara umum entah dalam lingkungan pemerintahan maupun independen, poin ini lebih menekankan otoritas kampus/perguruan tinggi sebagai basis lingkungan akademisi. Dalam melakukan riset-riset, kampus harus bebas dari jerat intensi kekuasaan. Gaung “Kampus Merdeka” yang diluncurkan menteri pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim misalnya tidak harus berkiblat pada respon kemajuan di era industri 4.0 tetapi juga mengupayakan suatu kampus dengan bangunan dasar, sebagaimana disebut Thomas Jefferson sebagai *illimitable freedom of human mind*.¹⁷ Kampus harus merdeka dari jeratan kekuasaan yang telah tercemar intensi imperial. Antitesis dari kebebasan yang dimaksud ialah kepasrahan untuk diinstrumentalisasi oleh kehendak tunggal kekuasaan.

Penutup

Jerat kekuasaan menghalangi akademisi untuk mempertahankan otoritasnya sebagai *state of mind* dalam komunitas bernama negara. Sebagai partisipan politik, ia terlibat dalam relasi politik tetapi tidak untuk mendukung elite politik tertentu melainkan mengemban tugas intelektual untuk mensuplai, mengevaluasi dan mengawal kualitas akademis kebijakan-kebijakan politik yang diambil. Nafsu dalam rangka kredit akademik tidak boleh menganggangi nilai etis-moral akademik. Karena itu, akademisi berjuang demi negara melalui prinsip *trial and error* tanpa menghamba pada kepentingan kuasa. Kerja akademis harus terbebas dari jerat kekuasaan politis.

Mengutip Foucault, dalam konteks relasi kekuasaan, akademisi mesti menjadi seorang parhesias atau truth-teller yang “terlibat” di tengah dunia dan berbicara secara jelas. Ada kombinasi antara “keresahan” sosial dengan komitmen akademik. Berbeda dengan seorang guru yang coba membataskan ajaran dan informasi, seorang parhesias mencari kondisi-kondisi politis sambil mencerna perbedaan-perbedaan etis dalam wacana kebenaran.¹⁸ Lebih dari, dituntut kewibawaan akademisi yang tegas untuk tetap mempertahankan otonomi dirinya. Dengan demikian, akademisi mengemban misi intelektual dalam mempersoalkan eksistensi, menjernihkan konsep, mengarahkan teori menuju praksis sambil mengadabkan kehidupan secara multidimensi. Partisipasi politik yang luhur dengan komitmen akademik tetapi tidak terceburlah dalam langgam budak penguasa, demikian relasi akademisi dan kekuasaan politis.

Catatan Akhir

1. Bdk. “Plagiarisme” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme>, diakses tanggal 29 April 2021.
2. Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 367.
3. *Ibid.*
4. *Ibid.*, hlm.368.
5. Terkait kebijakan publik dalam masyarakat, tuntutan fakta dan data yang valid selalu diandalkan sebagai titik pijak kesepakatan. Di luar analisa empiris, kesepakatan yang dimaksud tidak mampu mengemban suatu kebenaran objektif untuk diberlakukan secara universal. Karena itu, penentuan masalah sebagai basis pencarian referensi empiris, dilimpahkan kepada kewajiban akademisi sebagai pihak yang profesional dan yang telah teruji kredibilitasnya. Kehidupan bermasyarakat yang dimaksud, telah menunjukkan betapa akademisi tidak bisa lepas sebagai partisipan kehidupan sosial. Adalah kewajiban sosial seorang akademisi untuk menentukan persoalan secara proporsional. Bdk. Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013), hlm. 237-239.
6. A. Sudiarja, *Percakapan Politik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), hlm. XVII.
7. K. Bertens, *Filsafat Barat Kontempore Jilid II, Prancis* (Jakarta: PT Kompas Gramedia, 2019), hlm. 312.
8. *Ibid.*, hlm. 311.
9. *Ibid.*, hlm. 313.
10. Foucault menyebut “anatomi politis” untuk menggambarkan ketakungkinan individu untuk tidak terlibat dalam relasi kuasa. Bdk. Konrad Kebung, *Rasionalisasi dan Penemuan Ide-Ide* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm. 177.
11. *Ibid.*
12. Yudhi Hertanto, “New Normal, Peran Intelektual dalam Genggam Kekuasaan”, dalam <https://kumparan.com/yudhi-hertanto/new-normal-peran-intelektual-dalam-genggam-kekuasaan-1tVFkPXjgcR/full>, diakses pada 29 April 2021.
13. Tommy F. Awuy, “Membongkar Kooptasi Kekuasaan Tunggal”, dalam Frans. M Parera dan T. Jakob Koekerits (penyunt), *Masyarakat Versus Negara Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara* (Jakarta: PT Kompas Gramedia, 2002), hlm. 143.
14. Yudhi Hertanto., *Loc. cit.*
15. Moeslin Abdurrahman, “Peran Masyarakat Akademis sebagai Bagian Masyarakat Madani”, dalam Frans. M Parera dan T. Jakob Koekerits (penyunt), *Masyarakat Versus Negara Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara* (Jakarta: PT Kompas Gramedia, 2002), hlm. 256.

16. *Ibid.*, hlm 257.

17. *Ibid.*

18. Lih. Robertus Robet, “Belunggu Kampus Merdeka” dalam *Tempo* edisi 9-15 Maret 2020, hlm. 52-53.

19. Dr. Kondrad Kebung, SVD., *Op. Cit.*, hlm. 176.